



**EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN
CIPINANG BESAR SELATAN KECAMATAN JATINEGARA JAKARTA
TIMUR**

Fakhra Heryuni Prastanti¹, Ari Subowo², Sri Suwitri³

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1296

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Poverty and inequality have always been topics of actual social problems that occur in Indonesian society. The government's efforts to break the chain of poverty and strengthen social protection are based on the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program. This research aims to analyze the effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in Cipinang Besar Selatan Village, Jatinegara District, East Jakarta. The research method used is a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews, observation and documentation. This research uses Edy Sutrisno's theory of measuring program effectiveness, namely program understanding, right on target, right on target, on time, and real change. The results of the research show that the indicators of right on target, achievement of goals and real change have not been effective, because obstacles are still found in implementation, while the indicators of understanding the program and timeliness have gone well. The suggestions from this research are to form a Joint Business Group, increase the knowledge and skills of PKH assistants, and the government must be more selective when validating data on KPM candidates with PKH companions.

Keywords : Effectiveness, Family Hope Program, Welfare

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar keempat di dunia dilihat dari segi jumlah penduduk setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Pada tahun 2022 penduduk Indonesia berjumlah 275 juta jiwa. Mayoritas populasi penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa sekitar 59 persen dari total penduduk, hanya menempati 7,0 persen wilayah dari seluruh Indonesia. Populasi penduduk sebesar ini membuat Indonesia memiliki banyak sekali persoalan-persoalan rumit yang terjadi di masyarakat seperti kemacetan, kemiskinan, dan lain-lain. Kemiskinan dan ketidaksetaraan selalu menjadi topik sensitif untuk setiap negara, terutama di Indonesia. Kemiskinan dapat menghambat pembangunan suatu bangsa, yang berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak manusia. Akibat situasi kemiskinan ini, berdampak terhadap eksistensi masyarakat (*multiplier effects*) dalam tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh.

Kebijakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, seperti perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir dan pembangunan infrastruktur. Namun gejala kemiskinan di Indonesia belum sepenuhnya bisa teratasi. Pemerintah sudah melakukan banyak program bantuan sosial

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebijakan-kebijakan atau program yang dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diantaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selain itu terdapat pula Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Tiga dari sekian banyak program pemerintah yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak sesuai dengan yang diharapkan, banyak menimbulkan kekecewaan dan banyak kendala yang ditemukan di lapangan terkait penyaluran bantuan program tersebut. Menanggapi hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakan program baru dalam pengembangan sistem perlindungan sosial dengan cara membantu rumah tangga miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Program tersebut dinamakan Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin (KM), atau dalam istilah internasional dikenal dengan *Conditional Cash Transfers* (CCT).

Pelaksanaan PKH di Indonesia dimulai tahun 2007, dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada KM untuk meningkatkan kualitas hidup melalui perubahan perilaku terhadap pendidikan dan kesehatan serta mendukung tercapainya kesejahteraan sosial. PKH juga dimaksudkan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga (dampak konsumsi langsung), sekaligus meningkatkan investasi bagi generasi masa depan. Target sasaran penerima adalah Rumah Tangga/Keluarga Sangat Miskin atau kelompok masyarakat berada pada kluster 1 (satu).

Tabel 1.1

Kriteria Penerima PKH

PROGRAM KELUARGA HARAPAN	
Pelayanan yang diberikan	Kriteria
1. Pendidikan	Anak yang berusia 7-15 tahun dan terdaftar pada satuan Pendidikan.
2. Kesehatan	Anak usia 0-6 tahun, ibu hamil dan nifas.
3. Kesejahteraan Sosial	Lanjut usia mulai dari 60 tahun dan penyandang disabilitas diutamakan disabilitas berat.

(Sumber : Pedoman Pelaksanaan PKH Kemensos, 2021)

Upaya dalam peningkatan efektivitas pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) diperlukan adanya sinkronisasi dan koordinasi antar seluruh instansi terkait, mulai dari tingkat Pusat sampai ke tingkat Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, mulai dari perencanaan sampai implementasinya dengan melibatkan

berbagai unsur 3asyarakat, maupun pihak lain yang terkait. Lembaga atau badan tersebut bertanggung jawab untuk menyalurkan dan menjamin efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

Faktor penunjang keberhasilan dalam program PKH yaitu peran dari tim pendamping PKH. Dalam pelaksanaannya setiap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang menerima dana bantuan didampingi oleh pendamping dalam pengalokasian dana yang telah didapatkan agar tepat pada sasaran yaitu untuk pendidikan dan kesehatan. Proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH merupakan agenda rutin yang harus dilakukan sebagai upaya mengarahkan RTSM agar tepat dalam penggunaan dana bantuan tersebut.



Gambar 1.1

Tingkat Kemiskinan Kecamatan Jakarta Timur Tahun 2022

(Sumber : Dinas Sosial Kota Jakarta Timur, 2022 diolah oleh peneliti)

Dikutip dari Kompas.com, Kepala Seksi Perlindungan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Jakarta Timur, Ridwan, mengatakan bahwa jumlah penerima PKH di Kecamatan Jatinegara sebesar 4.558 kepala keluarga, sementara di Kecamatan Cakung sebesar 3.913 kepala keluarga. Kemudian disusul Kecamatan Pulogadung (2.402), Matraman (2.202), Cipayang (2.093), Duren Sawit (2.071). Lalu ada Kramatjati (1.873), Pasar Rebo (1.767), Makasar (1.750), dan terakhir Ciracas (1.608). Jumlah rumah tangga penerima PKH itu bisa bertambah sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Program Keluarga Harapan diselenggarakan pertama kali di Jakarta Timur pada tahun 2010. Kelurahan Cipinang Besar Selatan merupakan salah satu wilayah di Jakarta Timur yang mendapatkan Program Keluarga Harapan. Daerah ini berdekatan dengan Banjir Kanal Timur (BKT) dengan jumlah populasi penduduk sebesar 44,18 yang terdiri dari 10 RW dan 128 RT. Mata pencaharian masyarakat sekitar Kelurahan Cipinang Besar Selatan adalah pegawai pemerintah, pedagang, wiraswasta, buruh harian lepas, pemulung, bahkan ada yang tidak bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan primer. Program

Keluarga Harapan yang telah dilaksanakan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan sudah berjalan baik, namun masih terdapat beberapa masalah atau hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan program ini.

Tabel 1.2
Jumlah Penerima Bantuan Sosial
Program Keluarga Harapan di
Kecamatan Jatinegara Tahun 2023

No	Kelurahan	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Jumlah
1.	Bidara Cina	633	690	632	1.175	3.130
2.	Cipinang Besar Selatan	649	667	600	1.106	3.022
3.	Kampung Melayu	553	629	573	1.056	2.811
4.	Cipinang Besar Utara	593	622	567	996	2.778
5.	Rawa Bunga	463	509	464	858	2.294
6.	Cipinang Muara	501	508	452	823	2.284
7.	Cipinang Cempedak	321	361	324	581	1.587
8.	Bali Mester	186	193	174	328	881

(Sumber : Suku Dinas Sosial Kota
Administrasi Jakarta Timur)

Berdasarkan tabel 1.2, jumlah penerima bantuan sosial PKH di Kecamatan Jatinegara tahun 2023, Kelurahan Cipinang Besar Selatan menduduki posisi kedua dengan jumlah 3.022 KPM PKH. Sedangkan untuk posisi pertama dengan jumlah penerima bantuan sosial PKH terbanyak berada di Kelurahan Bidara Cina sebanyak 3.130 KPM PKH. Kemudian disusul oleh Kelurahan lainnya yaitu Kelurahan Kampung Melayu, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kelurahan Rawa Bunga, Kelurahan Cipinang Muara, Kelurahan Cipinang Cempedak, dan terakhir Kelurahan Bali Mester.

Tabel 1.3
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Kecamatan Jakarta Timur Tahun
2022

Nama Kelurahan	Jumlah DTKS
Bali Mester	3310
Bidara Cina	12847
Cipinang Besar Selatan	13891
Cipinang Besar Utara	18025
Cipinang Cempedak	8514
Cipinang Muara	11975
Kampung Melayu	14711
Rawa Bunga	7407

(Sumber : <https://satudata.jakarta.go.id/>)

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Data DTKS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, Kelurahan Cipinang Besar Selatan memiliki sebanyak 13.891 masyarakat yang terdaftar dalam DTKS. Namun seringkali DTKS ini mengalami hambatan karena masih banyaknya data masyarakat Kelurahan Cipinang Besar Selatan yang tidak sinkron dengan data di Disdukcapil, penggunaan data penerima bantuan sosial banyak yang belum terupdate dan data yang ditetapkan Kementerian Sosial

masih tidak tepat sasaran.

Permasalahan pertama ditemukan nya beberapa keluarga yang dari segi finansial sudah termasuk dalam kategori Sejahtera namun masih menerima bantuan PKH sedangkan masih banyak masyarakat/keluarga yang memprihatinkan dan layak dibantu namun justru tidak mendapatkan bantuan tersebut. Permasalahan kedua yang dihadapi yaitu adanya masyarakat yang terbuai dengan dana yang diberikan oleh pemerintah, seakan-akan pemerintah memberikan dana tersebut secara cuma-cuma dan dapat dipakai untuk keperluan apa saja seperti banyak masyarakat yang setelah mendapatkan dana PKH masyarakat membeli elektronik baru seperti televisi, handphone, kulkas, dan keinginan pribadi lainnya. Permasalahan ketiga yaitu kurangnya informasi mengenai PKH, banyak masyarakat Kelurahan Cipinang Besar Selatan yang salah paham mengenai bantuan PKH. Mereka mengira bahwa dengan mereka mendaftar bantuan PKH maka akan mendapatkan bantuan tersebut. Hal tersebut belum tentu terjadi, karena diterima atau tidaknya tergantung dari kriteria penerima PKH dan kriteria miskin yang ditentukan oleh Kementerian Sosial.

Pelaksanaan pendampingan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan

menemui beberapa kendala. Faktor penghambat atau kendala dalam penelitian ini dibedakan dalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menjadi kendala yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai makna dari PKH dan tidak adanya perubahan pola pikir (*mindset*) menuju keluarga sejahtera. Faktor eksternal yang menjadi kendala adalah penginformasian dari pusat yang sifatnya mendadak yang menyebabkan hasil yang dicapai kurang maksimal. Serta kendala teknis yang terjadi pada saat pendataan dan penyaluran bantuan sosial dan komplementer.

Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas, penelitian ini didasarkan pada Teori Pengukuran Efektivitas Program yang dikemukakan oleh Edy Sutrisno (2010) terdiri dari lima indikator, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana keberjalanan PKH tersebut dapat menyejahterakan masyarakat, terutama masyarakat sekitar Kelurahan Cipinang Besar Selatan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan

tuntas dengan menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Situs penelitian ini adalah di Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.

Dalam menetapkan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dan *simple random sampling*, yang mencakup Koordinator PKH Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur, Koordinator PKH Tingkat Kecamatan Jatinegara, Pendamping PKH Kelurahan Cipinang Besar Selatan, dan Keluarga Penerima Manfaat PKH Kelurahan Cipinang Besar Selatan. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Uji validitas data yang digunakan yaitu triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur

1. Pemahaman Program

Pemahaman program yaitu untuk mengetahui sejauh mana masyarakat dapat memahami program PKH. Dengan menilai kelompok sasaran, maka kita dapat mengetahui apakah suatu program dapat

dikatakan efektif atau tidak. Pemahaman program kepada masyarakat dapat dilakukan kegiatan sosialisasi. Sebagai awal pengenalan Program Keluarga Harapan (PKH) maka diselenggarakan sosialisasi program PKH melalui kegiatan rutin Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dilaksanakan setiap satu bulan sekali dengan durasi 2 jam yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perubahan perilaku KPM terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dalam keluarga. Keluarga Penerima Manfaat yang hadir berjumlah sekitar 20-30 orang dan dipimpin oleh Ketua Kelompok yang telah terpilih agar memudahkan pendamping dalam melakukan koordinasi. Lokasi pelaksanaan P2K2 berada di Pos RW ataupun rumah KPM yang telah disepakati bersama dengan pendamping PKH.

Kemampuan dan pengetahuan pendamping sebagai fasilitator Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sangat mempengaruhi pemahaman Keluarga Penerima Manfaat tentang materi-materi dalam modul yang telah disampaikan. Pendamping memerlukan trik-trik khusus dalam penyampaiannya, maka dari itu pendamping menyisipkan permainan di dalam materi sehingga materi yang

disampaikan mudah dicerna oleh ibu-ibu serta menyenangkan, tidak membuat KPM yang hadir merasa jenuh dengan penyampaian materi yang baku.

Mengenai indikator pemahaman program, sosialisasi maupun komunikasi mengenai Program Keluarga Harapan sudah berjalan baik, sehingga masyarakat mampu memahami konsep PKH, hak dan tujuan bagi penerima PKH, serta menerapkan materi-materi modul yang sudah diajarkan di kehidupan sehari-hari. Dengan mengadakan pertemuan kelompok secara rutin dapat memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi serta menjalin kedekatan dengan pendamping PKH. Sehingga dengan demikian, indikator pemahaman program ini dapat dikatakan efektif untuk Program Keluarga Harapan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan.

2. Tepat Sasaran

Pada penelitian ini, tepat sasaran yang dimaksud adalah penerima yang dinyatakan lolos sebagai penerima bantuan dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berdomisili di sekitar Kelurahan Cipinang Besar Selatan dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

2.1 Komponen Kesehatan

Kriteria Komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2018 Tentang Program Keluarga Harapan, yaitu ibu hamil atau menyusui serta anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. Telah dilakukan seleksi terhadap komponen kesehatan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan penetapan KPM PKH berdasarkan komponen kesehatan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan sudah sesuai. Namun dalam mewujudkan ketepatan sasaran komponen kesehatan tersebut terdapat indikasi permasalahan internal yang menjadi suatu penghambat, masih ditemukannya keluarga penerima manfaat PKH di Kelurahan Cipinang Besar Selatan yang tidak mau mengikuti peraturan Program Keluarga Harapan. Selain itu pendamping tidak bisa mengambil tindakan langsung saat pemutakhiran data untuk mengecek apakah KPM tersebut masih layak atau tidak mendapat bantuan PKH.

2.2 Komponen Pendidikan

Kriteria pada komponen pendidikan adalah keluarga miskin atau rentan miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki anak yang sedang mengenyam pendidikan wajib 12 (dua belas) tahun dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar/ sederajat sampai Sekolah Menengah Atas/ sederajat. Selama keberjalanan Program Keluarga Harapan tentunya tidak lepas dari permasalahan yang terjadi dalam komponen pendidikan

yaitu adanya calon Keluarga Penerima Manfaat yang tergolong kelompok miskin atau rentan miskin yang tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu kendala lainnya adalah ketidakcocokan antara data yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) sehingga anak sekolah yang cocok dengan kriteria komponen pendidikan tidak tercover oleh bantuan sosial PKH.

2.3 Komponen Kesejahteraan Sosial

Sasaran kriteria komponen kesejahteraan sosial ialah seseorang yang sudah lanjut usia, baik lansia tunggal maupun lansia yang dalam kartu keluarga ada anggota keluarga lainnya dan berusia mulai dari 60 (enam puluh) tahun serta penyandang disabilitas yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Komponen kesejahteraan sosial khususnya lansia dan penyandang disabilitas belum sepenuhnya mencakup keluarga penerima manfaat yang sesuai dengan kriteria sasaran dikarenakan adanya KPM yang tidak dilayakkan oleh Pemerintah Daerah sehingga sampai saat ini masih dicarikan solusinya. Cara lain dalam mewujudkan ketepatan sasaran adalah penyelenggara PKH memaksimalkan layanan aspirasi dan pengaduan secara langsung bagi keluarga penerima manfaat terkait keberjalanan program bantuan sosial PKH, keluarga

penerima manfaat dapat datang langsung ke Kantor Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur.

3. Tepat Waktu

Tepat waktu yaitu penggunaan waktu dalam pelaksanaan program harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan waktu yang tepat maka program akan berjalan efektif. Pada penelitian ini, penggunaan aspek waktu dimaksudkan dalam pelaksanaan pencairan dan penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan kepada Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Cipinang Besar Selatan.

Proses penyaluran bantuan sosial PKH secara tunai/langsung disalurkan berdasarkan data KPM yang terdaftar dan telah ditetapkan dalam master data pusat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) lalu nantinya akan dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pengajuan permohonan dana bantuan sosial PKH ke kas negara. Setelah surat tersebut diterbitkan, maka dana bantuan sosial PKH tersebut dikirimkan ke 2 tempat pembayaran yang sudah bekerjasama dengan Kemensos yaitu melalui anggota bank Himbara dan PT. Pos Indonesia. Ketepatan waktu dalam pencairan dana bantuan sosial PKH sangat diperlukan, mengingat dana bantuan sosial yang diberikan setiap 3 (tiga) bulan sekali

melalui PT Pos Indonesia dan 2 (dua) bulan sekali melalui rekening kepada masing-masing peserta PKH. Penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun.

Terdapat permasalahan pada pemerataan bantuan sosial PKH di Kelurahan Cipinang Besar Selatan yang disebabkan adanya data yang tidak diperbaharui di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta penambahan atau pengurangan kuota keluarga penerima manfaat.

4. Tercapainya Tujuan

Salah satu tujuan PKH menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.

4.1 Meningkatkan Taraf Hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui Akses Layanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial

Tujuan dari Program Keluarga Harapan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan telah terlaksana dalam meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Peningkatan taraf hidup KPM di Kelurahan Cipinang Besar Selatan dapat dilihat dari adanya kemudahan akses pada komponen kesehatan yang dibuktikan dengan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan

KPM yang memiliki balita, seperti cek kehamilan dan menimbang berat badan ke Posyandu. Pada komponen pendidikan, KPM memiliki kemudahan akses layanan untuk membeli keperluan sekolah dan memberikan asupan bergizi. Kemudahan akses layanan pada komponen kesejahteraan sosial dirasakan oleh lansia dan penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pemeriksaan kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya terindikasi masih ditemukannya Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Cipinang Besar Selatan yang terlalu bergantung pada bantuan ini, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan sekolah anak.

4.2 Mengurangi Beban Pengeluaran dan Meningkatkan Pendapatan Keluarga Miskin dan Rentan Miskin

Tujuan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan melalui penggunaan bantuan sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga penerima manfaat, yaitu pada komponen pendidikan digunakan untuk keperluan sekolah, selanjutnya pada komponen kesehatan digunakan untuk pemeriksaan kesehatan, pemenuhan gizi ibu dan balita, terakhir pada komponen kesejahteraan sosial digunakan untuk pemenuhan gizi dan

membeli obat-obat bagi lansia maupun penyandang disabilitas. Tujuan Mengurangi Beban Pengeluaran dan Meningkatkan Pendapatan Keluarga Miskin dan Rentan Miskin belum dirasakan oleh beberapa KPM yang menerima bantuan sosial PKH di Kelurahan Cipinang Besar Selatan. Penghasilan yang didapatkan dari hasil pekerjaan suaminya masih belum bisa menutup biaya pengeluaran kebutuhan sehari-hari masih ditemukannya keluarga penerima manfaat yang menyalahgunakan bantuan sosial PKH tidak sesuai dengan aturan yang diberikan dalam pedoman PKH.

4.3 Menciptakan Perubahan Perilaku dan Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat Dalam Mengakses Layanan Kesehatan dan Pendidikan serta Kesejahteraan Sosial

Perubahan perilaku dan kemandirian dapat tercipta melalui perubahan mindset keluarga penerima manfaat dalam hal pendidikan anak, dalam mendidik anak KPM sudah berkurang melakukan tindakan kasar tidak seperti zaman dahulu. Pada bidang kesehatan ibu hamil dan balita sudah rutin memeriksa kesehatannya ke posyandu atau puskesmas terdekat, serta bidang kesejahteraan sosial terdapat KPM penyandang disabilitas mampu membuka usaha dari hasil menabung dana bantuan sosial PKH. Namun dalam menciptakan

kemandirian masih ditemukannya hambatan, hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran KPM yang sudah tidak masuk dalam kriteria PKH ataupun sudah memiliki kehidupan yang lebih baik untuk melakukan graduasi mandiri.

4.4 Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dan menjadi salah satu faktor pendukung dalam mengurangi masalah kemiskinan. Bagi KPM yang sedang atau berniat membuka usaha, maka nantinya bisa diusulkan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk mengikuti Program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial berupa pelatihan, pendampingan wirausaha, dan pemberian bantuan modal usaha. Peran pendamping dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan yaitu memberikan motivasi kepada para KPM yang masih terdaftar sebagai peserta PKH untuk menggunakan dana bantuan sosial PKH sesuai prioritas kebutuhan.

4.5 Mengenalkan Manfaat Produk dan Jasa Keuangan Formal kepada Keluarga Penerima Manfaat

Tujuan mengenalkan manfaat produk dan

jasa keuangan telah dilakukan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan dengan sosialisasi melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Dalam pertemuan tersebut Keluarga Penerima Manfaat diajarkan mengenai cara menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai bentuk kartu ATM dalam mengambil bantuan sosial PKH dan langkah-langkah pengaduan jika terdapat masalah. Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kelurahan Cipinang Besar Selatan sudah memahami produk dan jasa keuangan formal yaitu penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang digunakan sebagai alat transaksi pengambilan dana bantuan sosial PKH. Dengan demikian pada tujuan ini menunjukkan bahwa tujuan program keluarga harapan dalam mengenalkan produk dan jasa keuangan sudah berjalan efektif.

5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata adalah bentuk sebelum dan sesudah adanya pelaksanaan program yang dirasakan oleh seseorang/kelompok. Indikator Perubahan Nyata terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kelurahan Cipinang Besar Selatan dapat dilihat bahwa program bantuan sosial ini belum dapat mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi. Namun dampak yang dirasakan

dengan hadirnya bantuan sosial PKH sudah banyak dirasakan oleh KPM. Walaupun belum sepenuhnya efektif secara sempurna tetapi jika untuk membantu meningkatkan kebutuhan keluarga sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Perubahan nyata yang dibuktikan yaitu pemenuhan kebutuhan pokok masing-masing KPM dan dapat meringankan biaya pendidikan dan kesehatan.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cipinang Besar Selatan

1. Kondisi Lingkungan

Semua pihak yang terlibat dalam keberjalanan Program Keluarga Harapan telah menjalankan kerja sama yang baik, dimana Dinas sosial serta Suku Dinas Sosial, Koordinator Kota Administrasi Jakarta Timur, pihak Kecamatan Jatinegara, pendamping, serta pihak-pihak terkait lainnya telah berkoordinasi dan menjalin komunikasi yang baik guna memastikan ketepatan dan tujuan dalam Program Keluarga Harapan.

Pada sisi lainnya, kondisi sosial ekonomi memiliki pengaruh langsung yang sangat penting pada pemberian pelayanan publik dan mempengaruhi karakter badan pelaksana serta kecenderungan para pelaksana dalam mencapai tujuannya. Banyaknya Keluarga Penerima Manfaat yang kehilangan pekerjaan saat

mewabahnya Covid-19 di Indonesia pada waktu silam, menyebabkan daya beli masyarakat mengalami penurunan. Melihat kondisi tersebut, maka Keluarga Penerima Manfaat hanya bisa mengandalkan dana bantuan sosial PKH untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Kondisi sosial di Kelurahan Cipinang Besar Selatan sudah dikatakan bagus, karena banyak masyarakat yang mengenyam pendidikan mulai dari jenjang SD sampai Perguruan Tinggi. Pada jenjang SD, terlihat terjadinya peningkatan jumlah murid pada tahun 2022 sebesar 5.098 jiwa atau 3,3%. Selanjutnya pada jenjang SMP terjadi peningkatan jumlah murid pada tahun 2022 sebesar 1.426 jiwa atau 1%. Pada jenjang SMA, terjadi peningkatan di tahun 2022 yang berjumlah 2.688 jiwa atau 1,1%. Terakhir, pada jenjang SMK terlihat peningkatan cukup tinggi pada tahun 2022 sebesar 29% atau 1.891 jiwa.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia dibagi menjadi Suku Dinas Sosial, koordinator Kecamatan, pendamping Program Keluarga Harapan dan keluarga penerima manfaat Kelurahan Cipinang Besar Selatan. Pentingnya koordinasi antara Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan, dan pendamping PKH terletak pada optimalisasi hasil program. Kemampuan pelaksana PKH dalam menyelesaikan

permasalahan selama keberjalanan program PKH sudah berjalan baik. Komunikasi dan koordinasi merupakan sebuah bentuk komitmen para pelaksana PKH sebagai bentuk upaya yang terus dilakukan demi mencapai kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, peran pendamping sebagai fasilitator merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Pentingnya pendamping bagi KPM adalah untuk membantu mereka dalam memperjuangkan haknya, sehingga dibutuhkan pendampingan agar mendapatkan haknya yang patut mereka peroleh dari bantuan sosial PKH. Kegiatan pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat Kelurahan Cipinang Besar Selatan sudah berjalan lancar terutama bagi mereka yang memiliki permasalahan terkait bantuan sosial PKH. Tugas dan fungsi pendamping yaitu melakukan kunjungan ke rumah KPM untuk memfasilitasi dan menyelesaikan kasus pengaduan dengan cara menerima, mencatat, serta menyampaikan ke tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan solusi.

Sumber daya finansial menjadi hal yang utama bagi peserta PKH dalam memenuhi kebutuhan hidup. Besaran bantuan yang diberikan kepada Keluarga

Penerima Manfaat di Kelurahan Cipinang Besar Selatan sudah memadai. Bantuan tersebut dapat mengurangi beban kebutuhan hidup, terutama terkait dengan kebutuhan pendidikan dan kesehatan bagi Keluarga Penerima Manfaat di wilayah tersebut.

3. Kemampuan Agen Pelaksana

Kemampuan agen pelaksana merupakan sikap dan kemampuan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan dalam menunjang kelancaran program yang sedang terlaksana. Adapun agen pelaksana Program Keluarga Harapan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan yaitu pendamping PKH dan beberapa organisasi lain yang ikut bekerja sama seperti Pihak Kelurahan, Sekolah, Bank, dan Kantor Pos. Tidak optimalnya kemampuan pendamping dalam pelaksanaan P2K2 yaitu kurangnya pendalaman mengenai metode-metode pengajaran yang bersifat kreatif dalam pemberian materi berdasarkan 5 (lima) modul yang telah digunakan selama keberjalanan program PKH. Kemampuan pendamping Program Keluarga Harapan Kelurahan Cipinang Besar Selatan dalam penyampaian informasi pencairan dana bantuan sosial PKH sudah berjalan dengan baik. Strategi komunikasi yang digunakan oleh pendamping yaitu berkoordinasi dengan PT. Pos Indonesia serta Bank Himbara (BNI) untuk kepastian jadwal pencairan dana bantuan sosial PKH.

Setelah adanya kejelasan informasi dari kedua instansi tersebut, maka pendamping akan menyampaikan informasi terkait jadwal pencairan dan penyaluran kepada Keluarga Penerima Manfaat melalui ketua kelompok atau menggunakan media *WhatsApp*.

KESIMPULAN

1. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur

Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur jika dilihat dari 5 indikator yang dikemukakan oleh Edy Sutrisno, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dapat disimpulkan dari masing-masing indikator. Pertama, pada indikator pemahaman program, sudah berjalan baik dikarenakan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mampu memahami konsep PKH, hak dan tujuan bagi penerima PKH, serta telah menerapkan materi-materi modul yang sudah diajarkan di kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pemahaman program sudah dapat dikatakan efektif.

Kedua, pada indikator tepat sasaran yang meliputi 3 komponen PKH yaitu

pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan masih ada warga yang sudah masuk kategori sebagai penerima bantuan PKH tetapi belum bisa menjadi peserta KPM disebabkan adanya ketidaksesuaian data di Pusat Data Kementerian Sosial dengan data yang ada dilapangan dan juga calon penerima bantuan PKH harus menunggu adanya penambahan kuota penerima bantuan sosial PKH dari Kementerian Sosial. Di sisi lain adapula KPM yang kehidupannya sudah lebih baik tapi masih menerima bantuan PKH, sehingga pada indikator tepat sasaran belum sepenuhnya efektif.

Ketiga, pada indikator tepat waktu sudah berjalan baik dalam ketepatan waktu pencairan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan meskipun tanggal pencairan dananya tidak menentu namun dalam jangka waktu 3 bulan sekali dalam setahun penerimaan dana bantuan sosial PKH selalu berjalan lancar sehingga indikator tepat waktu dapat dikatakan efektif.

Keempat, pada indikator tercapainya tujuan, walaupun para KPM, pendamping PKH dan pihak-pihak terkait sudah berusaha untuk mewujudkan tercapainya tujuan PKH namun dapat dikatakan bahwa tujuan PKH masih belum sepenuhnya berjalan efektif. Tujuan PKH belum sepenuhnya tercapai diantaranya

disebabkan jumlah bantuan PKH yang diberikan masih belum sebanding dengan jumlah pengeluaran KPM untuk kebutuhan dasar sehari-hari serta rata-rata penghasilan sebagian besar KPM jumlahnya tidak terlalu besar dan diperolehnya tidak menentu setiap bulannya sehingga pada indikator tercapainya tujuan belum sepenuhnya efektif.

Kelima, pada indikator perubahan nyata program bantuan sosial ini belum dapat mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi. Walaupun belum sepenuhnya efektif secara sempurna tetapi jika untuk membantu meningkatkan kebutuhan keluarga sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Perubahan nyata yang dibuktikan yaitu pemenuhan kebutuhan pokok masing-masing KPM dan dapat meringankan biaya pendidikan dan kesehatan sehingga pada indikator perubahan nyata belum sepenuhnya efektif.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cipinang Besar Selatan

Faktor pendukung dan penghambat keefektifan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cipinang Besar Selatan terdiri dari tiga, yaitu kondisi lingkungan, sumber daya, dan kemampuan agen pelaksana. Pertama, adanya koordinasi dan komunikasi yang baik

antara semua pihak yang terlibat dalam keberjalanan Program Keluarga Harapan guna memastikan ketepatan dan tujuan dalam Program Keluarga Harapan. Selanjutnya, kondisi sosial di wilayah Kelurahan Cipinang Besar Selatan memiliki kondisi yang baik dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang sudah mengalami kemajuan. Namun masih terdapat kelemahan yaitu adanya masyarakat Cipinang Besar Selatan yang tidak bekerja ataupun tidak memiliki penghasilan tetap. Kedua, kemampuan pendamping dalam membantu menyelesaikan kendala yang dialami KPM sudah baik serta jumlah dana bantuan sosial PKH cukup membantu meringankan beban pengeluaran KPM. Ketiga, kemampuan pendamping dalam menyampaikan informasi jadwal pencairan sudah baik namun masih memiliki kelemahan yaitu pelaksanaan P2K2 tidak maksimal yang menyebabkan pendamping harus menanggung beban pekerjaan yang berlebihan.

SARAN

1. Pemerintah Kecamatan Jatinegara maupun Kelurahan Cipinang Besar Selatan harus lebih selektif saat melakukan validasi data calon KPM dengan pendamping PKH. Saat pendataan bersifat netral tidak ada unsur kekeluargaan dan perlu adanya

pendataan ulang sehingga penerima PKH dapat tepat sasaran. Selain itu ketika ada keluarga miskin yang telah mencapai taraf sejahtera, maka pemerintah Kecamatan Jatinegara maupun Kelurahan Cipinang Besar Selatan harus ikut berperan aktif memberikan pengarahan dan pemahaman kepada keluarga yang tergolong mampu tersebut untuk graduasi mandiri.

2. Melakukan pembentukan Kelompok Usaha Bersama dan menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi KPM dimana nantinya KPM dapat bekerja sama untuk memulai usaha bersama, berbagi sumber daya, dan memasarkan produk secara kolektif.
3. Pendamping PKH agar dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baik manajerial maupun teknis pendampingan serta meningkatkan profesionalisme kinerja dalam memberikan pendampingan sosial terhadap peserta KPM PKH.

DAFTAR PUSTAKA

Rini, O., Lestari, P., & Murti, D. (n.d.). Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (Pnpm Mandiri) (Studi Kasus Di Desa Sedengan Mijen, Kecamatan Krian, Kabupaten

Sidoarjo. Retrieved June 9, 2023, from

<https://core.ac.uk/download/pdf/293642381.pdf>

Tarifu, L. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mendukung Pengentasan Kemiskinan Di Desa Mataindaha Kecamatan Pasikolaga Kabupaten Muna. *6* (3), 1–10.

Belitang Potokopi. (2020). *Pedoman Pelaksanaan PKH*. Pedoman Pelaksanaan PKH. https://www.academia.edu/42381044/PEDOMAN_PELAKSANAAN_PKH

Domri, D., Ridwan, R., & Jaya, M. (2019). Eektivitas program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Abstrak Informasi Artikel. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, *1*(1), 1–16.

Annisa, A. (2020). Efektifitas Program Keluarga Harapan Dalam Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan.

Kristian, I., & Harapan, P. K. (2022). *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan*. *9*(1), 23–37.

- Hastuti, Ruhmaniyati, & Widyaningsih, D. (2020). Pelaksanaan PKH dan Program Sembako dalam Rangka Mitigasi Dampak Covid-19. *Catatan Penelitian SMERU*, 2, 1–8.
- Larasati, D., & Fentiny Nugroho. (2023). Kesejahteraan Pendamping Program Keluarga Harapan (Studi Deskriptif Pendamping PKH di Jakarta Timur). 23(1), 816–816. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.3118>
- Arthamevia, N., & Sukmana, H. (2022). Analysis of the Family Hope Program. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 20. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v20i0.1250>
- Tanamal, N. A. (2022). Analisa Faktor Kemiskinan Warga Kampung Ujung Cipinang Besar Selatan (Manusia Kuburan) Jakarta Timur. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 5(1), 89–97.
- Kevin Satria Prajatama, Endang Larasati, & Dyah Lituhayu. (2023). Manajemen Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Melalui E-Pbb Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(1), 173–192. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/32920/26300>
- Rara Karlina. (2021). Manajemen Publik Kantor Desa Pamarunan Dalam Memberikan Pelayanan Satu Atap Kepada Masyarakat (Studi di Kantor Desa Pamarunan, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau). *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 9(2), 57–66. <https://doi.org/10.37304/jispar.v9i2.1534>
- Aldy Zulian Saputra, Ida Hayu Dwimawanti, & Tri Yuningsih. (2023). Analisis Efektivitas Program Teknologi Aplikasi E-Retribusi Pasar (Tape Pasar) Di Kota Surakarta. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(2), 611–620. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i2.38487>
- La-Reartha, I., & Herawati, N. R. (2023). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Semarang. *Journal of Politic* <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/38465>

